

BAB I

PENDAHULUAN

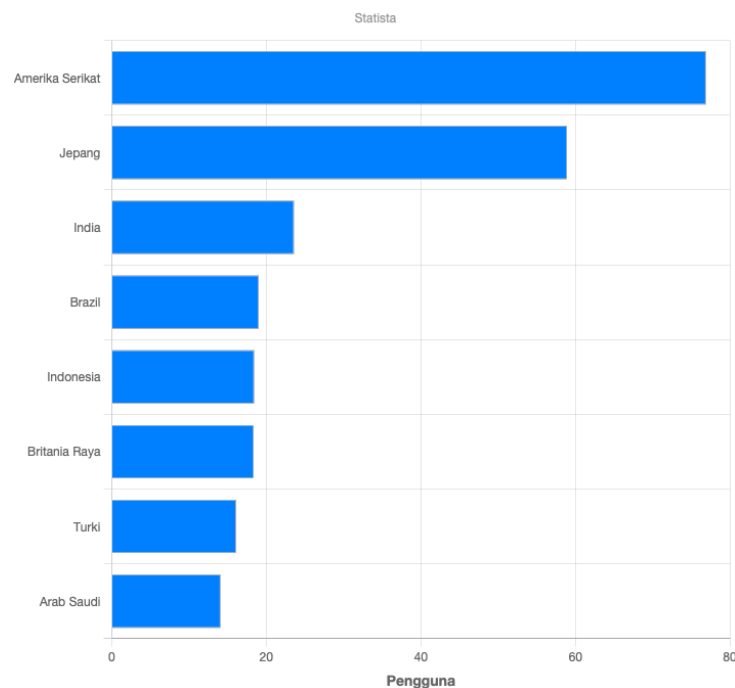
1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan salah satu tulang punggung dari politik postmodern, dari percakapan tatap muka, liputan berita internasional, dan bahkan postingan online. Komunikasi selalu berkontribusi dalam membentuk karakter dan lingkup dari masyarakat, kehidupan ekonomi, politik dan budaya. (Lorimer & Scannell, 1994: 1). Selebihnya, komunikasi merupakan kunci utama dalam politik global untuk mengatur hubungan antar negara, secara komunikasi merupakan cara yang ditetapkan guna mempengaruhi keputusan dan sifat dari pemerintahan luar negeri dan masyarakat melalui dialog, negosiasi, dan cara lain selain kekerasan atau peperangan.

Diplomasi adalah kajian keilmuan Hubungan Internasional yang dipakai sebagai alat inisiatif mempromosikan negara, meningkatkan eksistensi, atau menyebarkan pengaruh ke negara lain untuk meraih kepentingan nasional bagi negara (KM Panikkar, 1995: 3). Diplomasi merupakan salah satu alat utama negara guna melaksanakan politik luar negeri dan mencapai kepentingan nasional yang lalu bisa berubah menjadi nilai tawar atau *state branding* sebuah negara sehingga juga dapat membangun citra atau image dari sebuah negara (TD Effendy 2008:56). Media baru, utamanya media sosial menjadi salah satu media yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum sejak jaringan internet dapat diakses oleh mayoritas masyarakat di dunia. Tidak hanya masyarakat umum saja yang menggunakan media sosial, aktor-aktor politik pun melihat potensi media sosial yang dapat menjadi alat berpolitik di era digital ini baik untuk politik dalam negeri,

maupun luar negeri seperti diplomasi. Penerapan luas media sosial ke bidang diplomasi ada hubungannya dengan perubahan paradigma dalam diplomasi publik. Di abad ini, Amerika Serikat mencoba menyesuaikan diplomasi dengan berkembangnya internet dengan menciptakan definisi baru Diplomasi online yaitu *eDiplomacy*. Diplomasi digital ini memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, begitu juga kepada pemerintah lain (Melissen & Keulenaar, 2017).

Grafik 1.1 Data Negara Dengan Pengguna Twitter Terbesar Dunia



Sumber: Statista

Selama beberapa tahun ke belakang, media sosial sudah menjadi tempat para pemimpin dunia berdiplomasi melalui interaksi dua arah dengan audiens atau *followersnya*. Muncul sejak tahun 2010, Twitter merupakan media sosial yang paling populer dan umum digunakan dalam era diplomasi digital. Setidaknya terunglah 500 juta tweet per hari oleh total 436 juta pengguna. Amerika Serikat

berada di posisi pertama dengan 76,9 juta pengguna Twitter. Tak hanya masyarakat sipil biasa, Twitter banyak digunakan oleh para publik figur serta petinggi negara dunia guna berpolitik. Hal tersebut terjadi karena Twitter sebagai media sosial yang paling ramai dipakai dalam menyebarkan berita dapat membantu menjadi media promosi yang interaktif dengan *user* lain. Donald Trump telah menjadikan Twitter sebagai media favoritnya untuk membagikan hampir semua hal, termasuk penghinaan, video montase, dan bahkan informasi mengenai keputusan kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada usaha diplomasi digital Trump melalui Twitter. Kekhawatiran penulis berawal dari fenomena tingkah Donald Trump yang seringkali mengutarakan opini yang tidak disertai bahasa yang sopan dan penuh hormat yang seharusnya menjadi kode etik dalam diplomasi publik. Sejak Trump membuat akun Twitter @realDonaldTrump pada Mei 2009, ia telah mempublikasikan lebih dari 58.000 *tweets* dengan kesaksian lebih dari 88 juta *followers*, namun sebanyak 1.140 diantaranya telah dihapus karena bersifat kontroversial.

Pemanfaatan Twitter oleh Presiden Donald Trump menggunakan akun Twitter yang digunakan untuk menyebarkan informasi, laporan, dan pemberitaan penting terhadap khalayak umum menjadi sorotan dikarenakan Trump dinilai cukup aktif menulis di akunnya @realDonaldTrump dengan jumlah total 26.242 tweet (Brendan, 2016). Disamping itu, Presiden Trump juga aktif dalam melaksanakan interaksi dengan pemimpin dunia. Trump kerap membagikan kegiatan kunjungan ke negara lain melalui cuitan di Twitter pribadi miliknya. Dalam praktik diplomasinya, dapat dilihat bahwa Trump berusaha untuk melakukan interaksi dengan khalayak umum sehingga membangun image Trump yang memiliki gaya

yang transparan dan diplomatis. Selain Trump menyampaikan agenda pertemuan dan kunjungan selanjutnya, Trump juga memberikan informasi kepada pengikutnya terkait dengan beragam isu dan agenda-agenda pemerintahan yang harus segera untuk diselesaikan. Tentunya, gaya politik yang diambil oleh Trump adalah gaya politik dengan menerapkan konsep diplomasi publik digital (Zaharna, 2022). Trump juga dinilai aktif dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di Amerika Serikat, salah satunya adalah kebijakan pemotongan pajak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Pew Research Center*, didapatkan hasil bahwa 49% masyarakat menolak dan 36% setuju dengan program Trump. Ketidaksetujuan tersebut menjadikan Trump semakin gencar dalam melakukan diplomasi melalui Twitter yang dapat menarik simpati dari publik dan percaya terhadap kebijakan yang akan diterapkannya.

Aktifnya Trump di platform Twitter mampu memancing kontroversial dimana Tweet dari Trump mampu menimbulkan beragam perdebatan. Perdebatan tersebut dikarenakan banyaknya cuitan yang ditulis oleh Trump yang kerap menyinggung isu politik internasional dan memiliki sifat merendahkan. Dalam menulis cuitan di akun Twitter pribadinya, Trump dinilai menggunakan Bahasa yang tidak sopan dan tidak menghormati diplomatik dalam beberapa cuitan di akun Twitter pribadinya. Salah satu cuitan Trump yang kontroversial adalah cuitan Trump yang menyinggung China sebagai negara yang menyebabkan Covid-19.

“Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the ‘incompetence of China’ and nothing else that did this mass Worldwide killing!”

Tweet yang ditulis oleh Trump tentang Virus Corona tersebut mendapatkan perhatian dari publik dengan 189,8 ribu like, 40,6 ribu retweet, dan 8.743 komentar. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang aktif dalam melakukan interaksi dengan Trump. Cuitan Trump menimbulkan reaksi dari masyarakat publik dimana banyak yang memberikan penilaian cuitan yang ditulis oleh Trump di Twitter tidak mencerminkan sosok pemimpin negara. Hal ini dikarenakan diksi yang digunakan menimbulkan provokatif (Cahyaningsih, 2024).

Sebagai salah satu pemimpin dengan pengikut terbanyak di Twitter, dapat dikatakan bahwa segala perkataan Donald Trump bisa secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, salah satunya adalah dampaknya terhadap hubungan Amerika Serikat dengan China. Transisi digital mengubah banyak bagian dari praktik diplomasi tradisional yang biasa dilakukan secara langsung *face to face*. Namun, upaya Donald Trump dalam penggunaan akun twitternya perlu ditanyakan: Apakah *Twiplomacy*nya berhasil dalam membangun dan menjaga hubungan bilateral AS-China? Melalui tulisan ini, peneliti berfokus pada usaha praktik publik diplomasi baru di era digital yang gagal dilaksanakan oleh mantan presiden Donald Trump melalui media sosial Twitter selama masa jabatannya, secara Trump sebagai pemimpin yang aktif melangsungkan *Twiplomacy* dengan cara yang non-formal, tidak disertai bahasa yang santun, dan isi cuitan di Twitter yang dapat dianggap kurang pantas sebagai bentuk diplomasi kepada negara saingan, China.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, penulis merumuskan sebuah permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni

bagaimana kegagalan *Twiplomacy* Donald Trump berpengaruh pada hubungan AS dan China.

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum serta tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perihal *twitter diplomacy* yang dilakukan oleh Donald Trump, terutama dengan kaitannya dengan pengaruh hubungan bilateral antara AS dengan China.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana *twitter diplomacy* yang diterapkan oleh Trump Donald seharusnya dipandang: sebagai usaha publik diplomacy melalui implementasi *twitter diplomacy* atau upaya *twiplomacy*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan akademis dan kegunaan praktis bagi para pembaca sebagaimana diuraikan pada sub bab berikutnya.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memperluas wawasan penstudi Hubungan Internasional terkait ambiguitas fenomena rusaknya hubungan bilateral AS-China karena *Twitter Diplomacy* yang dilakukan oleh Donald Trump.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi penelitian selanjutnya terkait fenomena *Twiplomacy*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam mengatasi praktik *Twiplomacy* sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait *Twiplomacy* pada masa yang akan datang. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori dan konsep dalam studi hubungan internasional dan komunikasi diplomatik di era digital. Peneliti Indonesia dapat menggunakan temuan dari penelitian ini untuk menyelidiki bagaimana *Twiplomacy* dan diplomasi digital mempengaruhi hubungan internasional di tingkat regional dan global, serta implikasinya bagi Indonesia. Kemudian Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan strategi diplomasi digital bagi Indonesia. Dengan memahami dampak dan dinamika *Twiplomacy*, para pembuat kebijakan Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam menggunakan media sosial untuk mencapai tujuan diplomasi, berkomunikasi dengan mitra internasional, dan menangani isu-isu global.

1.5 Kerangka Pemikiran Konseptual

Topik *Twiplomacy* dapat dikatakan belum populer di kalangan penstudi Hubungan Internasional. Hal ini tentunya juga dipengaruhi karena konsep *Twiplomacy* yang belum banyak digunakan, kecuali oleh sejumlah media. Oleh karenanya, penulis juga mencantumkan penelitian yang membahas perihal *diplomasi publik* suatu negara, khususnya yang dibangun melalui *Twiplomacy*.

Salah satu penelitian terkait pembentukan *diplomasi public* melalui twiplomacy adalah penelitian yang berjudul “Twiplomacy in the age of Donald Trump: Is the diplomatic code changing?” yang ditulis oleh Maja Šimunjak and Alessandro Caliendo. Penelitian ini hanya menggunakan konsep *diplomasi publik* dan new media sebagai pisau analisisnya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana peran Donald Trump dalam diplomasi publiknya dapat turut mempengaruhi citra Amerika Serikat terhadap hubungan bilateralnya dengan China.

Meski penelitian terkait *twiplomacy* terbilang cukup jarang, bukan berarti penelitian terkait topik ini sama sekali tidak ada. Salah satu penelitian tersebut adalah tesis dari Farell yang berjudul “*New Public Diplomacy: Analisis Diplomasi Twitter (Twiplomacy) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*” Tesis tersebut menggunakan tiga kerangka konseptual, yakni *New Public Diplomacy*, *Network Communication Approach*, dan lebih spesifiknya merambat ke Triple Helix Perspective yang juga akan diadopsi penulis dalam penelitian ini. Tesis tersebut berfokus untuk membentuk citra negara yang baik di hadapan publik melalui media sosial baru: Twitter. Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa usaha akun twitter Kemlu RI berupa unggahan tweets dan hashtags menaikkan citra Indonesia di dunia internet. Namun, apabila dilihat secara kritis, sebenarnya pemerintah Indonesia belum secara penuh memaksimalkan media sosial twitter dalam upaya penguatan public diplomacy.

Perbedaan penelitian yang ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus kepada kegagalan Donald Trump dalam menjaga citra Amerika Serikat dalam dunia internasional serta hubungan bilateralnya dengan

China. Namun, penulis mengadopsi tiga kerangka konseptual yang digunakan oleh Søyland (2020) dalam tesisnya, yakni konsep *idiosinkratik*, konsep *Diplomasi Publik*, dan konsep *New Media*. Hal ini dikarenakan ketiga konsep tersebut berkaitan satu sama lain dan merupakan konsep paling akurat untuk menganalisa masalah yang ingin diteliti peneliti dan mencapai tujuan dari penelitian ini.

1.5.1 Idiosinkratik

Idiosinkratik merupakan konsep yang menjelaskan pengaruh-pengaruh yang diambil oleh para aktor dalam melaksanakan kebijakan luar negeri. Idiosinkratik menempel kepada pemimpin dari negara dan menganalisa aspek-aspek yang dimiliki oleh para aktor dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, idiosinkratik mendalami aktor tersebut dari segi nilai-nilai yang dipahami, bakat yang dimiliki, dan pengalaman-pengalaman yang telah dijalani oleh aktor tersebut yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan politik. Faktor-faktor idiosinkratik mencakup citra, karakteristik, dan persepsi yang dimiliki aktor dalam pembuatan kebijakan. Kepribadian yang dimiliki oleh seorang aktor dapat mempunyai peran yang sangat besar dalam pembuatan keputusan. Secara singkat, James Coloumbis dan Wolfie mengartikan idiosinkratik sebagai variabel yang terdiri dari persepsi, citra, dan ciri khas dari aktor dalam pembuatan kebijakan (Papasi,2018:9)

1.5.2. Diplomasi publik

Diplomasi adalah instrumen yang digunakan oleh hubungan internasional untuk mencapai kepentingan nasional. Secara tradisional, diplomasi adalah upaya suatu negara bangsa untuk mengupayakan kepentingan nasional di dalam lingkup

internasional (Holsti, 1984: 82-83). Kegiatan diplomasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni *first-track diplomacy* dan *multi-track diplomacy*. *Multi-track diplomacy*, atau dapat juga disebut sebagai diplomasi publik adalah segala upaya agar tercapainya kepentingan nasional dengan cara menggunakan paham-paham seperti *comprehension*, *information division*, dan *influencing and affecting foreign audiences*. Apabila diplomasi konvensional dikembangkan melalui proses *government to government relations*, maka diplomasi publik dititikberatkan di *government to people* atau *people to people relations*. Diplomasi publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara untuk dapat memberikan kontribusi dalam upaya membangun relasi yang baik dengan negara lain (Jeffrey, 2006: 2-3).

Menurut Leonard (2002: 9-10), terdapat empat tujuan untuk melakukan diplomasi publik di abad dua puluh satu, yaitu:

1. Meningkatkan keakraban-membuat masyarakat berfikir dan mengubah image persepsi mereka tentang negara, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai negara tersebut.
2. Meningkatkan apresiasi-menghadirkan persepsi yang positif dengan membuat masyarakat melihat suatu isu dari perspektif negara tersebut.
3. Mengajak dan mendorong masyarakat agar dapat melihat suatu negara sebagai tujuan yang menarik bagi pariwisata dan studi, membeli produk, maupun mengadopsi budaya dan *value* dari suatu negara.
4. Mempengaruhi sikap masyarakat serta mengupayakan peningkatan dukungan masyarakat terhadap suatu posisi negara.

1.5.3. *New Media*

Fajar Junaedi mengutip Flew, Power dan Littlejohn dalam mendefinisikan New Media sebagai sebuah bentuk yang menggabungkan tiga hal: jaringan komunikasi; dan konten media & informasi digital. Selain itu, New Media juga didefinisikan Power dan Littlejohn sebagai sebuah terobosan baru dalam bidang teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya internet, yang dapat mengubah masyarakat. Menurut Junaedi (2011: 53), kemampuan menguasai teknologi, khususnya internet, memberikan kapasitas bagi media baru untuk mempengaruhi perubahan besar dalam sebuah masyarakat sosial.

1.6. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan acuan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang sama, tetapi menggunakan sudut pandang atau kerangka pemikiran yang berbeda. Berbeda kerangka pemikiran, artinya berbeda pula variabel yang diangkat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari kelemahan yang harus diperbaiki dari setiap penelitian terdahulu. Namun, penelitian ini akan mengutip beberapa unsur dari variabel-variabel yang ada, baik data maupun argumen sebagai referensi penunjang.

Literatur acuan pertama yaitu artikel jurnal yang berjudul *Twiplomacy: How Twitter Affects Contemporary Public Diplomacy* oleh Margianta Surahman Juhanda Dinata (2014). Dalam kajian ini, *Twiplomacy* dilihat sebagai alat dan sarana bagi aktor-aktor negara untuk melakukan diplomasi. Artikel ini juga membahas bagaimana aktor-aktor non-negara dapat juga berkontribusi dalam melakukan diplomasi dengan cara mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sudah ada

dengan dukungan media massa. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana keefektivitasan dari *Twiplomacy* yang sangat unggul dibandingkan diplomasi tradisional, secara *Twiplomacy* dapat mencapai banyak orang dalam waktu yang sangat singkat, akan tetapi juga memiliki efek jera yang langsung jika terjadinya informasi yang salah dalam konteks maupun penyampaian. *Twiplomacy* dapat dikatakan cara yang sangat baru dan modern dalam melakukan diplomasi publik, namun tidak sepenuhnya mengubah cara berdiplomasi dan bisa kita sebut sebagai bentuk *eDiplomacy*. *Twiplomacy* merupakan cara menyampaikan informasi dengan sangat cepat dan merupakan skill diplomasi yang sangat baik untuk dimiliki oleh aktor-aktor negara. Dengan adanya skill *Twiplomacy*, aktor negara dapat melakukan diplomasi secara efisien hanya dalam hitungan detik, selebihnya ber-*Twiplomacy* sangatlah berguna dalam contoh kasus pandemi dan kondisi di mana berdiplomasi tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

Literatur kedua, merupakan artikel jurnal yang berjudul *New Public Diplomacy: Analisis Diplomacy Twitter (Twiplomacy) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* oleh Farell (2021). Artikel ini dikaji menggunakan analisis Diplomasi Publik dan *New Public Diplomacy* oleh Edmund Gullion yang mengartikan bahwa Diplomasi Publik merupakan segala bentuk tindakan memengaruhi yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun individu untuk merubah atau membuat opini terhadap suatu pemerintahan maupun individu. Diplomasi Publik ini telah dilakukan oleh Trump melalui *Twiplomacy*, pengaruh perubahan opini kelak akan menjadi objek utama penelitian peneliti. Artikel ini membahas kehadiran dari Diplomasi Publik Baru melalui *Twiplomacy* yang dikaji melalui Kemenlu RI. Pengaruh-pengaruh dari kehadiran transisi diplomasi digital terhadap

Indonesia dan juga proyeksi diplomasi digital yang akan dilakukan oleh Kemenlu RI. Analisis data dari literatur ini memahami bahwa Kemenlu RI memegang peranan penting sebagai pionir dalam upaya diplomasi digital lokal di Twitter agar melaksanakan diplomasi publik menggunakan Twitter (*Twiplomacy*) bisa menjadi hal yang dinormalisasikan, akan tetapi masih kurang dalam pengoperasian dan pelaksanaan *Twiplomacy*.

Literatur ketiga berjudul *Pengaruh eDiplomacy dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat - Kuba pada Masa Pemerintahan Barack Obama* oleh Tirsa Kristiani Br Ginting (2019). Artikel ini menjelaskan posisi Amerika Serikat sebagai negara dengan kemajuan teknologi yang terbesar untuk mengimplementasikan paham *eDiplomacy* dalam rangka memajukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Program *eDiplomacy* ini dilaksanakan untuk merealisasikan misi pembangunan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba. Artikel ini mencoba untuk menerangkan bagaimana *eDiplomacy* dapat digunakan sebagai alat yang dapat mempermudah hubungan diplomatik AS dan Kuba dengan cara menganalisis berbagai penggunaan media dan implikasi penggunaan sosial media. Artikel ini dikaji dengan menggunakan pemahaman *eDiplomacy* oleh Hanson yang menjelaskan penggunaan internet serta teknologi informasi dan komunikasi demi mencapai kepentingan nasional dengan misi diplomatik. AS menggunakan strategi *eDiplomacy* agar hubungan dengan Kuba kembali normal dengan cara penghapusan pemblokiran koneksi jaringan global. Selain itu, Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk teknologi dan pelatihan anti penyensoran untuk memenuhi agenda *internet freedom* yang menjadi salah satu agenda AS dalam kebijakan *21st Century Statecraft* milik AS.

Kembalinya hubungan Diplomatik AS-Kuba pada Januari 2017 merupakan contoh keberhasilan *eDiplomacy* dalam menaikkan citra AS di Kuba. Keberhasilan normalisasi hubungan AS-Kuba membuktikan bahwa media massa dan internet memiliki pengaruh yang besar dalam mendapatkan perhatian rakyat Kuba. Meski telah terjadi negosiasi antar pemerintah namun tidak dapat lagi dipungkiri bahwa penggunaan media massa dan diplomasi digital telah membantu dalam melancarkan proses perbaikan hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Literatur ini dapat dijadikan acuan bahwa hubungan negara dapat melakukan transisi dengan adanya kebijakan-kebijakan baru dan juga diplomasi, sama halnya dengan Trump pada penelitian ini yang mampu merubah hubungan AS-Cina melalui *Twiplomacy*.

Literatur keempat adalah *Trump's Twiplomacy: A New Diplomatic Norm?* oleh Kaja Hughes (2020). Studi ini meneliti cara Trump menjebak negara-negara lain serta pemimpin mereka. Studi ini juga mengobservasi jika pemimpin negara asing mengikuti jejak Trump dalam komunikasi dan interaksi diplomatik di *Twitter*. Literatur ini dikaji menggunakan teori konstruktivisme dan teori penjejakan. Trump melakukan diplomasi di *Twitter* dengan cara informal dan tidak sopan, membuat Trump dijauhi dari cuitan-cuitan pemimpin-pemimpin negara, dan bahkan bila beberapa pemimpin negara berusaha agresif, mereka akan tetap menggunakan bahasa yang formal. Literatur ini namun mengkonklusikan bahwa meski cuitan Trump di *Twitter* merupakan hal yang informal dan terkadang menghina, *Twiplomacy* milik Trump tidak cukup kuat untuk mengubah hubungan-hubungan yang dimiliki, dan memerlukan lebih banyak faktor seperti pertemuan, koalisi, ketidaksetujuan, dan konferensi pers untuk terjadi perubahan dalam hubungan antar negara.

Literatur acuan kelima adalah Media Sosial Sebagai Sarana Diplomasi Suatu Negara: Penggunaan Twitter Oleh Presiden Donald Trump Dalam Hubungan Diplomasi AS-Iran oleh Muh. Ardi (2020). Literatur ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai bentuk diplomasi yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan pengaruh penggunaan Twitter Diplomacy (*Twiplomacy*) pada konflik AS-Iran. Studi ini menjelaskan pengaruh dari penggunaan *Twiplomacy* Trump yang menghasilkan penurunan opini domestik dan ketidakpercayaan rakyat dalam menghadapi isu AS-Iran. Literatur-literatur yang telah ditinjau merupakan literatur yang meneliti akan *Twiplomacy*, Diplomasi Digital, serta kebiasaan Trump dalam melakukan *Twiplomacy*. Studi ini bertujuan untuk mengemukakan ketidakefektivitasan *Twiplomacy* dalam hubungan bilateral AS-Cina.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Idiosinkratik

Penulis mendefinisikan idiosinkratik dengan memodifikasi pengertian idiosinkratik milik Papasi (2018:10) sehingga dapat diartikan bahwa idiosinkratik merupakan upaya untuk memahami kecenderungan-kecenderungan aktor dalam mengambil keputusan dan pembuatan kebijakan yang berasal dari nilai-nilai yang dipahami, pengalaman yang dilalui, dan bakat yang dimiliki. Idiosinkratik dalam kasus ini berfungsi sebagai upaya meneliti kecenderungan yang dilakukan Trump dalam melakukan *Twiplomacy*.

1.7.1.2 Diplomasi Publik

Dalam penelitian ini penulis mendefinisikan diplomasi publik dengan menggabungkan definisi milik Jeffrey (2006: 2-3), dan salah satu tujuan diplomasi publik milik Leonard(2002:10), sehingga dapat diartikan bahwa diplomasi publik adalah segala upaya untuk dapat mencapai kepentingan nasional negara dengan cara *understanding, informing, dan impacting foreign audiences opinion*. Mempengaruhi sikap masyarakat serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap posisi negara tersebut.

1.7.1.3 New Media

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep new media yang dikemukakan oleh Junaedi (2011: 53). Sehingga dapat diartikan bahwa *new media* merupakan kekuatan penguasaan teknologi (terutama internet) yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Idiosinkratik

Penulis berfokus pada analisa idiosinkratik Trump dalam membuat keputusan berdiplomasi melalui Twiplomacy yang terjalin.Trump melakukan dan membuat keputusan kebijakan politik luar negeri yang dapat mempengaruhi relasi yang dimiliki oleh AS-Cina. Oleh karena itu, data-data yang perlu diketahui dalam penelitian ini terkait idiosinkratik Trump adalah:

1. Reputasi Trump dalam *Twiplomacy* di kacamata pandang internasional;
2. Bagaimana idiosinkratik Trump saat ber-*Twiplomacy* menjadi pengaruh dalam relasi AS-Cina

1.7.2.2 Diplomasi Publik

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada ranah umum dan interaktif yang disediakan oleh jaringan *microblogging* yang disediakan oleh Twitter yang digunakan oleh Trump. Keterlibatan twitter sebagai wadah diplomasi publik dapat dikaji oleh masyarakat sipil, sarjanawan, dan aktor-aktor negara lainnya. Oleh karena itu, data-data yang perlu diketahui dalam penelitian ini terkait *Twiplomacy* Trump adalah:

1. Bagaimana budaya *Twiplomacy* dapat menjadi wadah untuk diplomasi publik dan bagaimana *Twiplomacy* dapat mempengaruhi relasi antara AS dan Cina;
2. Sektor-sektor yang mempengaruhi relasi AS-Cina dari implementasi *Twiplomacy*;

1.7.2.3 New Media

Penulis ingin memberi fokus pada Twitter yang menjadi wadah *New Media* untuk memfasilitasi jaringan komunikasi antar aktor negara dan masyarakat sipil yang terbuka dan interaktif. Oleh karena itu, data-data yang perlu diketahui dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Twitter dapat menjadi wadah diplomasi antar negara yang dapat melibatkan aktor dan masyarakat sipil;
2. Pengaruh Twitter dalam menjadi bagian dari *New Media* yang dapat digunakan dalam berdiplomasi;
3. Hasil dari *Twiplomacy* dalam relasi AS-Cina.

1.8. Argumen Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, dan Kerangka Pemikiran Konseptual (diplomasi publik dan *new media*), argumen utama penulis dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya usaha diplomasi melalui media sosial Twitter (*Twiplomacy*) yang dilakukan Donald Trump melalui media sosial Twitter merupakan dasar kebijakan China dalam membentuk diplomasi publik mereka. Pada intinya, penelitian ini memiliki asumsi dasar bahwa segala hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin di media sosial dapat berpengaruh terhadap hubungannya dengan negara lain.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana akan berusaha menggambarkan bagaimana twitter diplomacy Donald Trump mempengaruhi hubungan bilateral AS-China. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini sendiri bertipe eksplanatif, di mana tipe penelitian eksplanatif umumnya digunakan dalam penelitian yang mencari penyebab dan alasan akan suatu fenomena. Dalam penelitian eksplanatif, hubungan antara variabel-variabel dianalisis sifatnya dalam saling mempengaruhi satu sama lain

(Zaluchu, 2020). Selain itu, penelitian eksplanatif memungkinkan penulis untuk menguraikan dua atau lebih penjelasan yang bersaing untuk melihat penjelasan mana yang lebih kuat (Neuman, 2014: 40). Dalam konteks twiplomacy Donald Trump, penelitian eksplanatif dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara cuitan-cuitan Trump terkait dengan China dan tanggapan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah China. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana pengaruh cuitan Trump terhadap kebijakan China.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat di mana sebuah penelitian dilakukan. Menurut Creswell (2009: 114), situs penelitian dapat dibatasi ke dalam suatu kota atau suatu wilayah geografi. Oleh karenanya, situs penelitian ini adalah Kota Semarang karena penulis memanfaatkan studi kepustakaan atau *desk research*.

1.9.3. Subjek Penelitian

Menurut Moleong (dalam Nugrahani, 2014: 61-62) subjek penelitian aktor dalam latar sebuah penelitian, yaitu aktor yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian tersebut. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini adalah Donald Trump dan pihak-pihak lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dimaksudkan sebagai negara, tetapi juga institusi serta aktor-aktor politik yang turut terlibat dalam latar penelitian.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Data deskriptif sendiri bersifat non numerik sehingga tidak berupa angka-angka. Oleh

karenanya, data deskriptif bersifat verbal yang mana data tersebut berupa kata-kata, gambar-gambar, dan atau objek (Bakry, 2019: 19).

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data melalui studi dari literatur-literatur *offline* maupun *online* yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

1.9.6. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi sumber data primer (*primary source data*) dan sumber data sekunder (*secondary source data*) (Burnham, 2008: 187-188). Dalam penelitian, sangat penting untuk mengumpulkan data primer sebanyak mungkin. Sementara itu, data sekunder dapat digunakan untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh.

1.9.6.1. Data Primer

Data primer merupakan data asli, yang ditulis oleh individu yang memiliki akses secara langsung kepada informasi yang mereka sampaikan, teliti, atau terkait dengan suatu peristiwa (Bakry, 2019: 171-172). Data-data primer penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berupa pernyataan langsung, sumber resmi tangan pertama, arsip, laporan, serta dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan secara langsung oleh Twitter Data Statistics dan juga website resmi Twiplomacy.

1.9.6.2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang mengacu kepada data primer atau menganalisis data primer (Bakry, 2019: 172). Oleh karenanya, data sekunder

dalam penelitian ini berupa buku, artikel dan jurnal ilmiah, artikel berita, serta situs resmi pihak-pihak Amerika Serikat dan China yang terdapat di internet.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis sehingga mampu menarik kesimpulan yang mudah dipahami (Abdussamad, 2021: 159). Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data Content Analysis dengan teknik penelitian kualitatif dan memfokuskan penelitian pada isi komunikasi, makna isi komunikasi, pembacaan simbol-simbol dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2011).

1.9.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang akan dijelaskan lebih lanjut pada paragraf berikutnya.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah terkait topik yang diteliti penulis, perumusan masalah yang diajukan oleh penulis, serta kerangka pemikiran konseptual yang akan digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Bab ini juga memuat perihal metode penelitian dan jenis data yang digunakan penulis.

BAB II: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan terlebih dahulu memaparkan perihal Idiosinkratik Donald Trump dan Xi Jinping. Kemudian akan membahas Digital Diplomasi di Era Kepemimpinan Trump. Berikutnya, penulis akan menjelaskan perihal Faktor-Faktor Kegagalan Twiplomacy. Lebih lanjut terkait, penulis juga akan memaparkan

Dampak ketidakefektifan Twiplomacy Pada Era Trump Terhadap Hubungan AS-China secara mendetail.

BAB III: ANALISIS DAN KONSEP

Bab ini dikhususkan untuk menganalisis lebih lanjut data-data yang telah didapatkan pada Bab II, yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis akan dilakukan dengan menguraikan dua penjelasan, yakni Konsep New Media: Ketidakefektifan Digital Diplomasi dan Paradigma Konstruktivisme dalam memandang Pengaruh Twiplomacy Pada Era Trump, untuk melihat penjelasan yang lebih kuat berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini, maka bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian terhadap isu yang dibawa, yakni faktor-faktor apa saja yang membuat strategi publik diplomasi yang dilakukan Donald Trump melalui Twiplomacy justru dipandang masyarakat internasional sebagai perusak hubungan antara AS dengan China, alih-alih memperbaiki hubungan bilateral. Bab terakhir ini juga akan memuat saran-saran yang penulis tujukan kepada penelitian berikutnya terkait topik yang serupa.